

ABSTRAKSI

Kajian ini berawal dari penemuan indikasi beberapa kasus ketidaktepatan dalam menjalankan perintah kebijakan KPU Pusat oleh KPU Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017, seperti diketahui kelembagaan KPU bersifat Hierarki sehingga keputusan Pusat menjadi dasar Daerah dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu tesis ini berusaha mengungkap rancangan yang sebaiknya digunakan untuk mengelola hubungan KPU Pusat dan KPU Daerah agar lebih mandiri, kompeten dan berintegritas. Kerangka analisis yang penulis gunakan adalah teori perilaku organisasi dan pendekatan pola relasi individu/kelompok dalam proses konflik organisasi dalam manajemen sumber daya manusia yang bekerja di bawah relasi kuasa banyak kepentingan internal maupun eksternal penyelenggara pemilu. Mengutip Ramlan Surbakti dengan penguatan organisasi Penyelenggara Pemilu bersifat koordinatif, imperatif, dan punitive yang harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar semua tahapan pemilu.

Menggunakan study kasus KIP Aceh Barat Daya sebagai lokus, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis melihat secara jelas hubungan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan lebih dikhususkan dalam pengambil keputusan Penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak 2017. Hasil yang ditemukan lebih kepada Proses dinamika penyelenggaraan pemilihan dalam hal penetapan pasangan calon merupakan proses yang sarat dengan kepentingan. Kajian ini memeberikan rekomendasi tentang hubungan Pusat dan Daerah dalam sebuah Organisasi Hierarki dengan menekankan adanya komunikasi dan kedekatan hubungan dengan proses pengawasan dengan Asesment kepada KPU Daerah dalam setiap penyelenggaraan pemilihan.

Kata kunci: Hubungan KPU Pusat dan KPU Daerah, Tata Kelola Pemilu, Pemilihan, Organisasi Hierarki

ABSTRAK

This study originated from the discovery of indications of some cases of inaccuracy in the Central ELECTION COMMISSION policy commands run by the regional ELECTION COMMISSION in the election of Regional Heads in unison, as known institutional 2017 ELECTION COMMISSION hierarchy so the decision Center the basis of decision making in each Area. Therefore, this thesis seeks to unveil the draft that should be used to manage the Central ELECTION COMMISSION and the relationship of the area to be more independent, competent and has integrity. The framework of analysis that the author use is a theory of organizational behaviour and approaches of individual/group relationship patterns in the process of the conflict the Organization in human resource management working under power relations internal and much interest external organizer of the elections. Quote Ramlan Surbakti with strengthening organization consequential Election Organisers koordinatif, imperative, and punitive that must be implemented or enforced by the provincial ELECTION COMMISSION and ELECTION COMMISSION district/city so that all stages of the elections.

Using case study KIP Aceh Barat Daya as the loci, and uses a qualitative approach. The author clearly see a relationship that occurs in elections is more devoted to the determination of the decision maker prospective candidates and Vice Regent Regent elections simultaneously 2017. Results found more to the dynamics of the inaugural Election Process in terms of candidate designation is the process that loaded with interest. These studies give a recommendation on the relationship of the Center and the regions in a Hierarchical Organization with a communication and assert the closeness of relationships with the supervisory process with Asesment to the Regional ELECTION COMMISSION in any organization of the the election.

Keywords: *Central ELECTION COMMISSION Relations and Regional ELECTION COMMISSION, Election, election, Governance, organizational Hierarchy*